



LAPORAN KINERJA

BADAN PENGELOLAAN
KEUANGAN DAN ASET DAERAH
KABUPATEN KUTAI TIMUR
TAHUN 2024



LAPORAN KINERJA
BADAN PENGELOLAAN
KEUANGAN DAN ASET DAERAH
KABUPATEN KUTAI TIMUR
TAHUN 2024

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Alhamdulillah, segala puji untuk Allah SWT karena berkat rahmat-Nya, kami bisa menyelesaikan penyusunan Laporan Kinerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kutai Timur.

Saya juga ingin berterima kasih kepada seluruh pihak yang telah bekerja keras dan memberikan kontribusi terhadap penyelesaian Laporan Kinerja ini, terutama kepada para pegawai di lingkungan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kutai Timur. Karena disadari atau tidak, pencapaian kinerja selama tahun 2023 ini merupakan perwujudan dari pekerjaan dan kerja sama kita sebagai Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kutai Timur.

Laporan Kinerja adalah amanat dari pelaksanaan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, di mana kami selaku Perangkat Daerah (PD) berkewajiban menyusun Laporan Kinerja untuk disampaikan kepada Bupati Kutai Timur sebagai pertanggungjawaban janji dan komitmen kerja.

Laporan Kinerja ini merupakan gambaran pencapaian kinerja kami selaku Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kutai Timur. Selama setahun ini, banyak tugas dan pekerjaan yang telah kami laksanakan. Semua itu tidak luput juga dari khilaf dan kekurangan. Semoga saja apa pun yang telah kami kerjakan ini, menjadi manfaat dan kebaikan bagi kami selaku Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah serta bagi Pemerintah Kabupaten Kutai Timur.

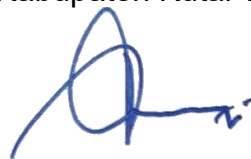
Kami mengharapkan Laporan Kinerja ini dapat menjadi wujud transparansi dan pertanggungjawaban atas pelaksanaan kegiatan Badan Pengelolaan Keuangan dan

Aset Daerah Kabupaten Kutai Timur. Akhir kata, semoga Laporan Kinerja ini juga dapat menjadi sarana evaluasi atas kinerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kutai Timur, serta memberikan umpan balik dan pemacu bagi upaya perbaikan kinerja pada masa yang akan datang.

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Sangatta, 1 Februari 2025

Kepala Badan Pengelolaan Keuangan
dan Aset Daerah
Kabupaten Kutai Timur



Ade Achmad Yulkafilah, S.T., M.M
NIP 197507172007011014

RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kutai Timur tahun 2024 adalah wujud pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dari Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kutai Timur tahun 2024. Laporan Kinerja menggambarkan dan menyajikan pencapaian kinerja dan realisasi keuangan atas perjanjian kinerja yang ditandatangani antara Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kutai Timur dan Bupati Kutai Timur.

Hal ini juga merupakan kewajiban Perangkat Daerah untuk menyusun dan menyajikan Laporan Kinerja berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Secara umum capaian kinerja pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kutai Timur mencapai **99,00%** dari target yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja.

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Ringkasan Eksekutif	iii
Daftar Isi	iv
Daftar Tabel	v
Bab I Pendahuluan	1
Latar Belakang	1
Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi	2
Struktur Organisasi	8
Sumber Daya Manusia	9
Isu Strategis	9
Sistematika Penyajian	10
Bab II Perencanaan Kinerja	10
Rencana Strategis	10
Perjanjian Kinerja	12
Rencana Anggaran	20
Bab III Akuntabilitas Kinerja	21
Capaian Kinerja	21
Analisis Capaian Kinerja	30
Realisasi Anggaran	31
Bab IV Penutup	32
Kesimpulan	32
Rencana Tindak	33
Lampiran	



DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Jumlah Pegawai berdasarkan Pangkat/Golongan	8
Tabel 2.1	Perjanjian Kinerja 2024	12
Tabel 2.2	Rencana Anggaran 2024	19
Tabel 3.1	Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2024	21
Tabel 3.2	Realisasi Anggaran Tahun 2024	30



BAB I
PENDAHULUAN

BAB I

PENDAHULUAN

LATAR BELAKANG

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) menyebutkan bahwa penyelenggaraan SAKIP pada Perangkat Daerah (PD) dilaksanakan oleh entitas akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah. Penyelenggaraan SAKIP itu meliputi rencana strategis, perjanjian kinerja, pengukuran kinerja, pengelolaan data kinerja, pelaporan Kinerja serta review dan evaluasi kinerja. Salah satu yang menjadi kewajiban Perangkat Daerah adalah menyusun dan menyajikan Laporan Kinerja atas prestasi kerja yang dicapai berdasarkan penggunaan anggaran yang telah dialokasikan, lalu menyampaikan Laporan Kinerja tersebut kepada Kepala Daerah.

Laporan Kinerja adalah ikhtisar yang menjelaskan secara ringkas dan lengkap tentang capaian Kinerja yang disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Laporan Kinerja ini merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kutai Timur atas penggunaan anggaran.

Tujuan pelaporan Kinerja ini adalah memberikan informasi kinerja yang terukur kepada Bupati Kutai Timur atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai, serta sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi instansi pemerintah untuk meningkatkan kinerjanya.

Penyusunan Laporan Kinerja ini berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor

53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Organisasi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kutai Timur merupakan unsur penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dipimpin oleh Kepala BPKAD, serta berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Dasar pembentukan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kutai Timur adalah Peraturan Bupati Kutai Timur Nomor 35 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi dan Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.

Selanjutnya tugas pokok dan fungsi pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kutai Timur diuraikan ke dalam masing-masing bagian dan bidang yaitu:

Sekretariat

Sekretariat mempunyai tugas memberikan pelayanan administratif dan teknis yang meliputi perencanaan, keuangan, urusan tata usaha, perlengkapan rumah tangga dan urusan ASN kepada semua unsur dilingkungan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kutai Timur.

Dalam rangka melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Sekretariat menyelenggarakan fungsi:

1. Menyusun rencana kerja, program, dan kegiatan Sekretariat sebagai pedoman dan acuan kerja;
2. Mengoordinasikan penyusunan program kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;
3. Mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis, pedoman, dan petunjuk teknis serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan lingkup tugas sekretariat;

4. Merumuskan bahan pengelolaan dan koordinasi administrasi umum dan kepegawaian; perencanaan program; dan keuangan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;
5. Memfasilitasi dan memberikan pelayanan teknis administrasi dalam lingkungan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;
6. Merumuskan bahan pengelolaan dan koordinasi dokumentasi, perpustakaan, arsip dan perlengkapan/perbekalan rumah tangga; serta pembinaan hubungan kemasyarakatan dan urusan keprotokolan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;
7. Menghimpun, mengelola, dan menyajikan data/informasi berkaitan dengan penyelenggaraan kinerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;
8. Memfasilitasi kerja sama dengan instansi terkait, Kabupaten, instansi vertikal serta pihak ketiga berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku untuk keberhasilan program kerja;
9. Menyinkronisasikan penyusunan laporan hasil pelaksanaan tugas bidang-bidang; Rencana Kerja Anggaran Dokumen Pelaksanaan Anggaran
10. Mengoordinasikan pengumpulan bahan Rencana Kerja Anggaran untuk menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;
11. Mengoordinasikan penyusunan rencana strategi dan rencana kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;
12. Mengendalikan kegiatan kesekretariatan dalam rangka mendukung kegiatan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;
13. Memberikan saran dan pertimbangan kepada atasan, terkait dengan bidang tugasnya;
14. Menyusun bahan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas jabatan;
15. Melakukan pembinaan dan memberikan motivasi, arahan dan penilaian terhadap kinerja bawahan; dan
16. Melakukan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bidang Anggaran

Bidang Anggaran mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan kebijakan di bidang anggaran.

Dalam melaksanakan tugas, Bidang Anggaran mempunyai fungsi:

1. Koordinasi pengalokasian anggaran dalam penyusunan Kebijakan Umum APBD dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara dan Kebijakan Umum Perubahan APBD/Prioritas Plafon Anggaran Sementara perubahan;
2. Koordinasi penyusunan Rencana Kerja Anggaran/Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah dan atau Rencana Kerja dan Anggaran Perubahan/Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah;
3. Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD;
4. Penyusunan Peraturan Kepala Daerah tentang Teknis Penyusunan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah;
5. Mengoordinasikan proses penyusunan anggaran pendapatan;
6. Mengoordinasikan proses penyusunan anggaran belanja daerah; dan
7. Mengoordinasikan proses penyusunan anggaran pembiayaan.

Bidang Perbendaharaan

Bidang Perbendaharaan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan kebijakan di bidang perbendaharaan.

Dalam melaksanakan tugas, Bidang Perbendaharaan mempunyai fungsi:

1. Mengoordinasikan pengelolaan dan pemindahbukuan uang kas daerah;
2. Mengoordinasikan penatausahaan pembiayaan daerah;
3. Mengoordinasikan pengelolaan dana perimbangan dan dana transfer lainnya;
4. Mengoordinasikan penempatan uang daerah dengan membuka rekening kas umum daerah;
5. Mengoordinasikan pemrosesan, penerbitan dan pendistribusian lembar Penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana;
6. Mengoordinasikan pelaksanaan dan penelitian kelengkapan dokumen Surat Permintaan Pembayaran dan Surat Perintah Membayar, pemberian pembebanan

- rincian penggunaan atas pengesahan Surat Pertanggungjawaban gaji dan non gaji, serta penerbitan Surat Keterangan Pemberhentian Pembayaran;
7. Mengoordinasikan penyusunan laporan realisasi penerimaan dan pengeluaran kas daerah, laporan aliran kas, dan pelaksanaan pemungutan/pemotongan dan penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK);
 8. Mengoordinasikan pelaksanaan piutang dan utang daerah yang timbul akibat pengelolaan kas, pelaksanaan analisis pembiayaan dan penempatan uang Daerah sebagai optimalisasi kas;
 9. Mengoordinasikan rekonsiliasi data penerimaan dan pengeluaran kas serta pemungutan dan pemotongan atas Penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana dengan instansi terkait;
 10. Mengoordinasikan penyusunan petunjuk teknis administrasi keuangan yang berkaitan dengan penerimaan dan pengeluaran kas serta penatausahaan dan pertanggungjawaban; dan
 11. Mengoordinasikan pelaksanaan penerbitan Surat Penyediaan Dana restitusi/pengembalian kelebihan penerimaan.

Bidang Akuntansi

Bidang Akuntansi mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan kebijakan di bidang akuntansi.

Dalam melaksanakan tugas, Bidang Akuntansi menyelenggarakan fungsi:

1. Mengoordinasikan pembukuan anggaran (akuntansi) penerimaan kas daerah;
2. Mengoordinasikan pembukuan anggaran (akuntansi) pengeluaran kas daerah;
3. Mengoordinasikan kegiatan penyusunan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;
4. Mengoordinasikan kegiatan penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD;
5. Melaksanakan konsolidasi seluruh laporan keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah, Badan Layanan Umum Daerah dan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah;
6. Menyusun tanggapan terhadap Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan atas laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;

7. Melaksanakan rekonsiliasi realisasi pendapatan dan belanja serta pembiayaan;
8. Menyusun analisis laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;
9. Menyusun kebijakan dan panduan teknis operasional penyelenggaraan akuntansi pemerintah daerah;
10. Menyusun sistem dan prosedur akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintah daerah;
11. Melaksanakan verifikasi dan pengujian atas bukti memorial;
12. Melaksanakan pembinaan dan sosialisasi tentang penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah sesuai sistem akuntansi pemerintah daerah; dan

Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah

Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan barang milik daerah.

Dalam melaksanakan tugas, Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah menyelenggarakan fungsi:

1. Mengoordinasikan penyusunan standar harga berdasarkan jenis dan tipe barang;
2. Penyusunan Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah;
3. Mengoordinasikan penyiapan bahan pertimbangan persetujuan dalam penyusunan rencana kebutuhan barang milik daerah;
4. Melaksanakan penatausahaan barang milik daerah;
5. Mengoordinasikan pelaksanaan inventarisasi barang milik daerah
6. Mengoordinasikan pelaksanaan pengawasan dan pengendalian terkait pengelolaan barang milik daerah;
7. Mengoordinasikan pelaksanaan pengamanan fisik, administrasi dan hukum barang milik daerah;
8. Mengoordinasikan penyiapan dokumen pengajuan usulan dan meneliti dokumen terkait penggunaan, pemeliharaan, pemanfaatan, pemusnahan dan penghapusan barang milik daerah;
9. Mengoordinasikan hasil penilaian barang milik daerah;

10. Mengoordinasikan pelaksanaan rekonsiliasi dalam rangka penyusunan laporan barang milik daerah;
11. Mengoordinasikan penyusunan dan penghimpunan laporan barang milik daerah dari Satuan Kerja Perangkat Daerah;
12. Mengoordinasikan dan melaksanakan pembinaan pengelolaan barang milik daerah; dan
13. Mengoordinasikan Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah.

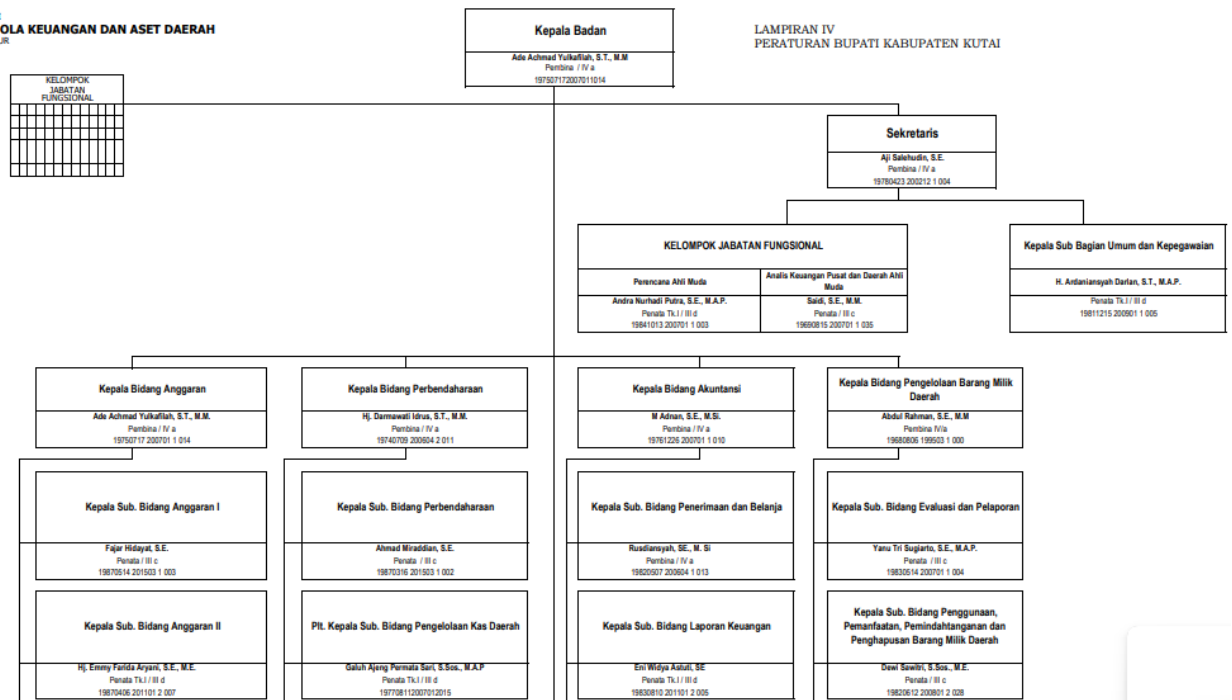
STRUKTUR ORGANISASI

Berdasarkan Peraturan Bupati Kutai Timur Nomor 35 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi dan Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah adalah sebagai berikut:

STRUKTUR ORGANISASI

STRUKTUR ORGANISASI
BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
KABUPATEN KUTAI TIMUR

LAMPIRAN IV
PERATURAN BUPATI KABUPATEN KUTAI



SUMBER DAYA MANUSIA

Dalam rangka melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kutai Timur didukung dengan sumber daya manusia sebanyak 131 orang, terdiri dari 56 orang Aparatur Sipil Negara (ASN) dan 75 orang Tenaga Kerja Kontrak Daerah (TK2D). Rincian pegawai disajikan sebagai berikut:

Tabel 1.1

Jumlah Pegawai berdasarkan Pangkat/Golongan

NO	GOLONGAN	JUMLAH
1	Pembina Utama Muda (IV c)	-
2	Pembina Tk I (IV b)	-
3	Pembina (IV a)	6 orang
4	Penata Tk I (III d)	8 orang
5	Penata (III c)	10 orang
6	Penata Muda Tk I (III b)	9 orang
7	Penata Muda (III a)	9 orang
8	Pengatur Tk I (II d)	5 orang
9	Pengatur (II c)	2 orang
10	Pengatur Muda Tk I (II b)	-
12	PPPK (Gol IX)	7 Orang
13	TK2D	75 orang
Jumlah		131 orang

ISU STRATEGIS

Terdapat beberapa isu strategis yang telah ditentukan terkait pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kutai Timur dalam melaksanakan sebagian urusan pemerintahan daerah di bidang pengelolaan keuangan daerah dan pengelolaan aset daerah, yaitu sebagai berikut:

1. Ketepatan waktu penyusunan APBD;
2. Ketersediaan anggaran kas dari besaran pendapatan yang ditargetkan harus dapat memenuhi kebutuhan belanja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kutai Timur;

3. Penatausahaan keuangan daerah sehubungan dengan penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) belum sepenuhnya dapat diterbitkan secara tepat waktu sesuai aturan perundangan yang berlaku;
4. Pengelolaan aset/barang daerah yang rinciannya belum sepenuhnya dapat dihitung secara tepat dalam Neraca Pemerintah Kabupaten Kutai Timur;
5. Opini Badan Pemeriksa Keuangan terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah belum mendapatkan Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

SISTEMATIKA PENYAJIAN

Laporan Kinerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kutai Timur Tahun 2024 ini disusun dengan sistematika sebagai berikut:

RINGKASAN EKSEKUTIF

BAB I PENDAHULUAN

Latar Belakang
Kedudukan Tugas Pokok dan Fungsi
Struktur Organisasi
Sumber Daya Manusia
Sistematika Penyajian

BAB II PERENCANAAN KINERJA

Rencana Strategis
Perjanjian Kinerja
Rencana Anggaran

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Capaian Kinerja
Analisis Capaian Kinerja
Pencapaian Kinerja Lainnya
Realisasi Anggaran

BAB IV PENUTUP

Kesimpulan
Rencana Tindak

LAMPIRAN



BAB II

PERENCANAAN KINERJA

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

RENCANA STRATEGIS

Sesuai dengan UU nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dinyatakan bahwa daerah sesuai dengan kewenangannya menyusun rencana pembangunan Daerah sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional. Kabupaten Kutai Timur telah memiliki RPJMD tahun 2021-2026 yang menuangkan visi dan misi, serta RKPD tahun 2024.

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah selaku perangkat daerah telah menyusun perencanaan strategis yang tertuang dalam Rencana Strategis Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kutai Timur (Renstra BPKAD) Tahun 2021-2026. Hal ini telah sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Selanjutnya Renstra BPKAD dijabarkan setiap tahunnya dalam bentuk Rencana Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (Renja) dan Perjanjian Kinerja.

1. Visi dan Misi

Visi pembangunan daerah Kabupaten Kutai Timur periode RPJMD tahun 2021-2026 adalah “Menata Kutai Timur Sejahtera untuk Semua”.

“Kutai Timur Sejahtera” adalah kondisi masyarakat Kutai Timur dalam keadaan baik, makmur, sehat, damai, dan dapat mengakses semua infrastruktur pelayanan

dasar. Sedangkan “Menata untuk Semua” adalah kondisi masyarakat Kutai Timur dengan tata Kelola pemerintahan yang baik, sehingga tercipta perubahan positif dan lebih produktif (*continuous improvement*) dalam mengelola sumber daya guna meningkatkan taraf hidup di semua lapisan masyarakat.

Untuk mewujudkan visi tersebut, ditetapkan misi pembangunan daerah sebagai berikut:

- a. Mewujudkan masyarakat yang berakhlak mulia, berbudaya dan bersatu;
- b. Mewujudkan daya saing ekonomi masyarakat berbasis sektor pertanian;
- c. Mewujudkan pelayanan dasar bagi masyarakat secara proporsional dan merata;
- d. Mewujudkan pemerintahan yang partisipatif berbasis penegakan hukum dan teknologi informasi;
- e. Mewujudkan sinergitas pengembangan wilayah dan integrasi pembangunan yang berwawasan lingkungan.

Berdasarkan misi Kabupaten Kutai Timur di atas, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kutai Timur sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya melaksanakan Misi 4, yaitu “Mewujudkan pemerintahan yang partisipatif berbasis penegakan hukum dan teknologi informasi”.

2. Tujuan dan Sasaran

Sebagai penjabaran Visi dan Misi Kabupaten Kutai Timur, maka tujuan kinerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kutai Timur adalah “Mewujudkan Penyelenggaraan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang berkualitas, transparan, bersinergi dan vakuntabel, responsive, partisipatif dalam mendukung Kabupaten Kutai Timur sebagai Kabupaten yang Mandiri

Sasaran:

- a. Terwujudnya Tertib Administrasi Dalam Pengelolaan Keuangan Daerah;
- b. Terwujudnya Tertib Administrasi Dalam Pengelolaan Barang Milik Daerah.

PERJANJIAN KINERJA

Perjanjian kinerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kutai Timur adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari Bupati Kutai Timur kepada Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kutai Timur untuk melaksanakan program dan atau kegiatan yang disertai dengan sasaran strategis, indikator kinerja dan target. Melalui perjanjian kinerja, terwujudnya komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja yang dilakukan dalam kurun waktu 1 (satu) tahun, berdasarkan tugas pokok, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia.

Tabel 2.1
Perjanjian Kinerja 2024

Sub Bagian Perencanaan Program

NO	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	TARGET
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota			
1	Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah	Tersusunnya dokumen perencanaan perangkat daerah	Dokumen
2	Koordinasi dan penyusunan dokumen RKA-SKPD	Hasil koordinasi dokumen RKA-SKPD	Dokumen
3	Koordinasi dan penyusunan dokumen perubahan RKA-SKPD	Tersedianya dokumen perubahan RKA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen perubahan RKA-SKPD	Dokumen
4	Koordinasi dan penyusunan DPA-SKPD	Tersedianya dokumen DPA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen DPA-SKPD	Dokumen
5	Koordinasi dan penyusunan perubahan DPA-SKPD	Tersedianya dokumen perubahan DPA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen perubahan DPA-SKPD	Dokumen
6	Koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Tersedianya laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Laporan
7	Evaluasi kinerja perangkat daerah	Terlaksananya evaluasi kinerja perangkat daerah	Laporan

Sub Bagian Keuangan

NO	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	TARGET
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			
1	Penyediaan gaji dan tunjangan ASN	Tersedianya gaji bagi ASN Kabupaten Kutai Timur	Orang/bulan
2	Penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	Tersedianya gaji bagi ASN Kabupaten Kutai Timur	Dokumen
3	Pelaksanaan penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD	Terlaksananya penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD	Dokumen
4	Koordinasi dan pelaksanaan akuntansi SKPD	Terlaksananya koordinasi dan pelaksanaan akuntansi SKPD yang baik	Dokumen
5	Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD	Tersedianya laporan keuangan akhir tahun SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD	Laporan
6	Pengelolaan dan penyiapan bahan tanggapan pemeriksaan	Tersedianya dokumen bahan tanggapan pemeriksaan dan tindak lanjut pemeriksaan	Dokumen
7	Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran SKPD	Tersedianya laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran SKPD dan laporan koordinasi penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulan/semesteran SKPD	Laporan
8	Penyusunan pelaporan dan analisis prognosis realisasi anggaran	Tersedianya dokumen pelaporan dan analisis prognosis realisasi anggaran	Dokumen

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

NO	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	TARGET
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah			
1	Penyusunan perencanaan kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Tersedianya rencana kebutuhan barang milik	Dokumen
2	Pembinaan, pengawasan, dan pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Terlaksananya pembinaan, pengawasan dan pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan
3	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Dokumen

NO	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	TARGET
4	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Terlaksananya penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan
5	Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	Dokumen

NO	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	TARGET
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			
1	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Paket
2	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Dokumen
3	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Dokumen
4	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Dokumen
5	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Orang
6	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang
7	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang

NO	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	TARGET
Administrasi Umum Perangkat Daerah			
1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Paket
2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Paket
3	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Paket
4	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Paket
5	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan
6	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan
7	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Dokumen

NO	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	TARGET
8	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Dokumen

NO	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	TARGET
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			
1	Pengadaan Mebel	Jumlah Pengadaan Mebel	Unit
2	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Unit
3	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Unit
4	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Unit

NO	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	TARGET
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
1	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Laporan
2	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Laporan
3	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Laporan

NO	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	TARGET
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
1	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	Tersedianya jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	Unit
2	Pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya	Terlaksananya pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya	Unit

Bidang Perbendaharaan

NO	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	TARGET
Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah			
1	Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank	Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank	Dokumen
2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/ Pematangan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/ Pematangan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	Laporan
3	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pematangan atas SP2D dengan Instansi Terkait	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pematangan atas SP2D dengan Instansi Terkait	Dokumen
4	Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	Dokumen
5	Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Orang
6	Penatausahaan Pembiayaan Daerah	Jumlah Penatausahaan Pembiayaan Daerah	Dokumen
7	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Jumlah Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Dokumen
8	Penyiapan, Pelaksanaan pengendalian dan penerbitan Anggaran Kas dan SPD	Jumlah Penyiapan, Pelaksanaan pengendalian dan penerbitan Anggaran Kas dan SPD	Dokumen
9	Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	Jumlah Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	Dokumen

NO	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	TARGET
10	Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas	Jumlah Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas	Dokumen

NO	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	TARGET
Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah			
1	Analisis perencanaan dan pelaksanaan penerimaan pinjaman pemerintah daerah	Terlaksananya analisis perencanaan dan pelaksanaan penerimaan pinjaman pemerintah daerah	Laporan
2	Pengelolaan dana darurat dan mendesak	Terkelolanya dana darurat dan mendesak	Laporan

Bidang Aset

NO	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	TARGET
Pengelolaan Barang Milik Daerah			
1	Penyusunan Standar Harga	Jumlah Standar Harga yang Disusun	Dokumen
2	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah	Dokumen
3	Penatausahaan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah	Laporan
4	Inventarisasi Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Inventarisasi (LHI) Barang Milik Daerah	Laporan
5	Pengamanan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah	Laporan
6	Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Laporan
7	Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Laporan
8	Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	Dokumen
9	Penilaian Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah	Dokumen

NO	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	TARGET
10	Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	Laporan
11	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Dokumen
12	Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Orang

Bidang Anggaran

NO	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	TARGET
Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah			
1	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun	Dokumen
2	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun	Dokumen
3	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD	Jumlah RKA-SKPD yang Diverifikasi	Dokumen
4	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Perubahan RKA-SKPD yang Diverifikasi	Dokumen
5	Pembinaan Perencanaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Tersedianya Pembinaan Perencanaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Orang
6	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD	Jumlah DPA-SKPD yang Diverifikasi	Dokumen
7	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Perubahan DPA-SKPD yang Diverifikasi	Dokumen
8	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Dokumen
9	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Dokumen

NO	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	TARGET
10	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	Jumlah Dokumen Regulasiserta Kebijakan BidangAnggaran	Dokumen

Bidang Akuntansi

NO	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	TARGET
Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah			
1	Rekonsiliasi dan verifikasi aset, kewajiban, ekuitas, pendapatan, belanja, pembiayaan, pendapatan-LO dan beban	Terlaksananya koordinasi pelaksanaan akuntansi penerimaan dan pengeluaran kas daerah	Laporan
2	Koordinasi penyusunan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD bulanan, triwulanan dan semesteran	Tersedianya laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD bulanan, triwulanan dan semesteran	Laporan
3	Konsolidasi laporan keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Terlaksananya konsolidasi laporan keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Laporan
4	Koordinasi dan penyusunan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD provinsi dan rancangan peraturan kepala daerah tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kabupaten/kota	Tersedianya rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD provinsi dan rancangan peraturan kepala daerah tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kabupaten/kota	Dokumen
5	Penyusunan tanggapan/tindak lanjut terhadap LHP BPK atas laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD	Tersedianya tanggapan/tindak lanjut terhadap LHP BPK atas laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD	Dokumen
6	Penyusunan kebijakan dan panduan teknis operasional penyelenggaraan akuntansi pemerintah daerah	Tersedianya kebijakan dan panduan teknis operasional penyelenggaraan akuntansi pemerintah daerah	Dokumen
7	Penyusunan sistem dan prosedur akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintah daerah	Tersedianya sistem dan prosedur akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintah daerah	Dokumen
8	Pembinaan akuntansi, pelaporan dan	Terlaksananya pembinaan akuntansi, pelaporan dan	Orang

NO	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	TARGET
	pertanggungjawaban pemerintah kabupaten/kota	pertanggungjawaban pemerintah kabupaten/kota	
9	Pembinaan pengelolaan keuangan BLUD kabupaten/kota	Terlaksananya pembinaan pengelolaan keuangan BLUD kabupaten/kota	Lembaga

NO	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	TARGET
Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah			
1	Pengelolaan dana bagi hasil kabupaten/kota	Terkelolanya dana bagi hasil kabupaten/kota	Laporan

Pengukuran Perjanjian Kinerja

Pengukuran Kinerja dilakukan dengan membandingkan antara kinerja yang (seharusnya) terjadi dengan kinerja yang diharapkan. Pengukuran kinerja ini dilakukan secara berkala dan tahunan. Pengukuran dan perbandingan kinerja dalam Laporan Kinerja menggambarkan posisi kinerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kutai Timur.

RENCANA ANGGARAN

Dalam rangka pencapaian target dalam perjanjian kinerja, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kutai Timur melaksanakan 3 program, 12 kegiatan dan 75 sub kegiatan yang didukung dengan anggaran Rp 1.454.895.235.501,00

Rincian rencana anggaran disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.2
Rencana Anggaran 2024

NO	PROGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN
A	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3.333.100.000,00
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	70.077.454.137,00
3	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	00,00
4	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	6.848.267.000,00

NO	PROGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN
5	Administrasi Umum Perangkat Daerah	15.103.085.862,00
6	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	483.310.000,00
7	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.061.500.000,00
8	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	4.292.686.520,00
B	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	
1	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	10.738.829.708,00
2	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	14.345.000.000,00
3	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	9.032.687.800,00
4	Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	1.283.827.313.474,00
C	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	
1	Pengelolaan Barang Milik Daerah	35.752.001.000,00
TOTAL		1.454.895.235.501,00

BAB III

AKUNTABILITAS

KINERJA

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja adalah perwujudan kewajiban Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kutai Timur untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah diamanatkan Bupati Kutai Timur dalam rangka mencapai misi Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Timur secara terukur dengan sasaran/target kinerja yang telah ditetapkan. Bentuk pertanggungjawabannya melalui Laporan Kinerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kutai Timur Tahun 2024.

CAPAIAN KINERJA

Capaian kinerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kutai Timur selama tahun 2024, disajikan dalam tabel sebagai berikut.

Tabel 3.1
Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2024

SASARAN PROGRAM	NO	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1	Tersedianya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	1	1	100,00%
	2	Tersedianya Dokumen RKA-SKPD	Dokumen	1	1	100,00%
	3	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dokumen	1	1	100,00%
	4	Jumlah Dokumen DPA-SKPD	Dokumen	1	1	100,00%
	5	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Dokumen	1	1	100,00%

SASARAN PROGRAM	NO	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	
	6	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	3	3	100,00%	
	7	Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	1	1	100,00%	
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	8	Tersedianya Gaji Bagi ASN Kab. Kutai Timur	Orang	133	133	100,00%	
	9	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen	1	1	100,00%	
	10	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	400	400	100,00%	
	11	Terlaksananya Akuntansi SKPD yang Baik	Dokumen	1	1	100,00%	
	12	Tersusunnya Laporan Akhir Tahun yang Akuntabel	Laporan	1	1	100,00%	
	13	Terlaksananya Penyiapan bahan Tanggapan Pemeriksaan	Dokumen	1	1	100,00%	
	14	Jumlah Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Laporan	2	2	100,00%	
	15	Jumlah Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Dokumen	1	1	100,00%	
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	16	Jumlah Pakaian Dinas beserta Atribut PNS dan TK2D	Paket	7	7	100,00%
		17	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Dokumen	5	5	100,00%
18		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Dokumen	2	2	100,00%	
19		Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	1455	574	100,00%	

SASARAN PROGRAM	NO	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
Administrasi Umum Perangkat Daerah	20	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	10	10	100,00%
	21	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	6	6	100,00%
	22	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	Laporan	3	3	100,00%
	23	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	12	12	100,00%
	24	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Dokumen	4	4	100,00%
	25	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Dokumen	2	2	100,00%
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	26	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	unit	10	10	100,00%
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	27	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12	12	100,00%
	28	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Laporan	3	3	100,00%
	29	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	2	2	100,00%
Pemeliharaan Barang Milik Daerah	30	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Unit	45	45	100,00%

SASARAN PROGRAM	NO	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	31	yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	4	4	100,00%
Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	32	Terlaksananya penyusunan KUA / PPAS	Dokumen	1	1	100,00%
	33	Terlaksananya penyusunan KUA / PPAS Perubahan	Dokumen	11	11	100,00%
	34	Jumlah RKA-SKPD yang Diverifikasi	Dokumen	57	57	100,00%
	35	Jumlah Perubahan RKA-SKPD yang Diverifikasi	Dokumen	57	57	100,00%
	36	Jumlah DPA- SKPD yang Diverifikasi	Dokumen	57	57	100,00%
	37	Jumlah Perubahan DPA-SKPD yang Diverifikasi	Dokumen	57	57	100,00%
	38	Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Dokumen	2	2	100,00%
	39	Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Dokumen	2	2	100,00%
	40	Jumlah Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	Dokumen	1	1	100,00%
	41	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Orang	250	250	100,00%
	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	42	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Dokumen	180	180
43		Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	Dokumen	1926	1926	100,00%

SASARAN PROGRAM	NO	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
	44	Jumlah Dokumen Hasil Penatausahaan Pembiayaan Daerah	Dokumen	4	4	100,00%
	45	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	Dokumen	250	250	100,00%
	46	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank	Dokumen	1	1	100,00%
	47	Jumlah Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) dan Laporan Hasil Koordinasi dalam rangka Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	Laporan	4	4	100,00%
	48	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan	Dokumen	2	2	100,00%

SASARAN PROGRAM	NO	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
		Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas				
	49	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait	Dokumen	12	12	100,00%
	50	Jumlah Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan		2	2	
	51	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Orang	348	348	100,00%
Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	52	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	Laporan	250	250	100,00%
	53	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO, dan Beban	Dokumen	57	57	100,00%
	54	Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	Laporan	12	12	100,00%
	55	Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi	Laporan	341	341	100,00%
	56	Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban	Dokumen	2	2	100,00%

SASARAN PROGRAM	NO	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
		Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota				
	57	Jumlah Dokumen Tanggapan/Tindak Lanjut Terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Dokumen	1	1	100,00%
	58	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	Orang	171	171	100,00%
	59	Jumlah BLUD Kabupaten/Kota yang Dibina (20 Lembaga)	Lembaga	20	20	100,00%
	60	Jumlah Laporan Statistik Keuangan Pemerintahan Daerah pada Pemerintah Kabupaten/Kota	Laporan	12	12	100,00%
Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	61	Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Laporan	1	1	100,00%
	62	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Laporan	3	3	100,00%
	63	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota	Laporan	12	12	100,00%
Pengelolaan Barang Milik Daerah	64	Jumlah Standar Harga yang Disusun	Dokumen	1	1	100,00%
	65	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah	Dokumen	1	1	100,00%

SASARAN PROGRAM	NO	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
	66	Jumlah Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	Dokumen	1	1	100,00%
	67	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah	Laporan	1	1	100,00%
	68	Jumlah Laporan Hasil Inventarisasi (LHI) Barang Milik Daerah	Laporan	57	57	100,00%
	69	Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah	Laporan	1	1	100,00%
	70	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah	Laporan	1	1	100,00%
	71	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	Laporan	5	5	100,00%
	72	Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Dokumen	5	5	100,00%
	73	Jumlah Laporan Hasil Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Laporan	1	1	100,00%
	74	Jumlah Laporan Barang Milik Daerah yang Disusun	Laporan	1	1	100,00%
	75	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Orang	250	250	100,00%
CAPAIAN KINERJA						99,00%

Tabel 3.2 Perbandingan Capaian Kinerja

No	Tujuan / sasaran	Indikator kinerja	Tahun (n-2)	Tahun (n-1)	Tahun (n)		
			Realisasi	Realisasi	Target	Realisasi	Capaian
1.4.1.1	Terwujudnya Tertib Administrasi dalam Pengelolaan Keuangan Daerah	Opini BPK terhadap Laporan Keuangan	WTP	WTP	WTP*	WTP*	WTP*
1.4.1.2	Terwujudnya Tertib Administrasi Dalam Pengelolaan Barang Milik Daerah	Opini BPK terhadap Laporan Keuangan	WTP	WTP	WTP*	WTP*	WTP*

ANALISIS CAPAIAN KINERJA

Capaian kinerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kutai Timur mencapai **99.00%** dari target yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja.

Terhadap 3 program yang dilaksanakan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kutai Timur, secara umum capaian kinerjanya telah mencapai target yang ditetapkan, analisis terhadap capaian 3 program tersebut diuraikan sebagai berikut:

1. Capaian kinerja Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota terdiri dari 75 indikator kinerja, sebanyak 75 indikator telah mencapai target.

Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota ini ditunjang oleh 7 kegiatan, yaitu:

- a. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah;
- b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah;
- c. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah;
- d. Administrasi Umum Perangkat Daerah;
- e. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah;
- f. Pengadaan Barang Milik Daerah penunjang Urusan Pemerintah Daerah;
- g. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.

2. Capaian kinerja Program Pengelolaan Keuangan Daerah terdiri dari 36 indikator kinerja dan seluruhnya telah mencapai target yang diharapkan.

Program Pengelolaan Keuangan Daerah ini ditunjang oleh 4 kegiatan, yaitu:

- a. Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah;
- b. Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah;
- c. Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah;
- d. Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah;

3. Capaian kinerja Program Pengelolaan Barang Milik Daerah terdiri dari 11 indikator kinerja dan seluruhnya telah mencapai target yang diharapkan. Program Pengelolaan Barang Milik Daerah ini ditunjang oleh 1 kegiatan, yaitu

- a. Kegiatan Pengelolaan Barang Milik Daerah.

REALISASI ANGGARAN

Realisasi anggaran Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kutai Timur tahun 2023 sebesar Rp945.147.209.222,00 atau terserap 93,77% dibandingkan dengan anggaran tahun 2024 sebesar Rp 1.393.264.640.521,00 atau terserap 95,76%. Rincian realisasi anggaran dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3.2
Realisasi Anggaran Tahun 2024

NO	PROGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI	%
A PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3.333.100.000,00	3.241.252.535,00	97,48%
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	70.077.454.137,00	61.684.918.131,00	88,02%
3	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	6.848.267.000,00	5.343.666.192,00	78,03%
4	Administrasi Umum Perangkat Daerah	15.103.085.862,00	12.822.464.998,00	84,90%
5	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	483.310.000,00	478.556.000,00	99,02%
6	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.061.500.000,00	908.916.850,00	85,63%
7	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	4.292.686.520,00	1.374.201.700,00	32,01%
B PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH				
1	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	10.738.829.708,00	5.066.553.463,00	47,18%

NO	PROGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI	%
2	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	14.345.000.000,00	13.376.753.423,00	93,25%
3	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	9.032.687.800,00	8.818.236.595,00	97,63%
4	Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	1.283.827.313.474,00	1.249.179.550.607,00	97,30%
C PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH				
1	Pengelolaan Barang Milik Daerah	35.752.001.000,00	30.969.570.027,00	86,62%
	TOTAL	1.454.895.235.501,00	1.393.264.640.521,00	95,76%

BAB IV

PENUTUP

BAB IV PENUTUP

KESIMPULAN

Laporan Kinerja ini adalah wujud pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dari Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kutai Timur tahun 2024. Laporan Kinerja menggambarkan dan menyajikan pencapaian kinerja dan realisasi keuangan atas perjanjian kinerja yang ditandatangani antara Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kutai Timur dan Bupati Kutai Timur.

Secara total pencapaian kinerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kutai Timur mencapai **95,76%**

RENCANA TINDAK

Dalam rangka mempertahankan dan meningkatkan kualitas kinerja serta pelayanan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kutai Timur untuk tahun-tahun ke depannya, maka diperlukan sejumlah langkah-langkah yang dirumuskan antara lain:

1. Melakukan telaah dan revisi Rencana Strategis Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah jika diperlukan, menyesuaikan dengan kondisi terkini dan RPJMD Kabupaten Kutai Timur;
2. Menyusun Perjanjian Kinerja tahun-tahun berikutnya menyelaraskan dengan Renstra dan RPJMD;
3. Melakukan kajian dan penyempurnaan produk hukum daerah yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan dan aset daerah;
4. Meningkatkan kapasitas sumber daya manusia aparatur guna menunjang keberhasilan pelaksanaan keseluruhan proses pengelolaan keuangan dan aset daerah di BPKAD maupun seluruh pengelola keuangan dan aset di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kutai Timur, baik dalam bentuk bimbingan teknis, Pendidikan dan pelatihan (Diklat), *workshop*, Program Pelatihan Mandiri (PPM), ataupun bentuk pelatihan lainnya.

